

Determinan Belanja Modal dan Konsekuensi terhadap Pendapatan Perkapita (Studi Kasus Wilayah Jawa Tengah)

PANCAWATI HARDININGSIH
RACHMAWATI MEITA OKTAVIANI*
Universitas Stikubank Semarang

Abstract: *This study aimed to determine the effect of fund balance consists of the general allocation funds, special allocation funds, financial assistance from the Provincial Government. The revenue and capital expenditure allocation to determine the effect of capital expenditures in each district/city in the administrative area of Central Java Provincial. The data used in this study were obtained from various data sources such as data from the district budget/ city, allocation funds transfer from the Directorate General of Fiscal Balance regional Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Central Bureau of Statistics and Central Java to the research data period of 4 (four) years the Fiscal Year 2008-2011.*

Hypothesis test results showed the general allocation funds and the financial assistance that significantly affect the allocation of capital expenditures in the district/town in the administrative region of Central Java province, while for components DAK, and revenue does not significantly affect the allocation of capital expenditure . In this study, capital expenditure budget contained in the district/city government administrative region showed a positive effect on per capita income of the area.

Keywords: *Balance Fund, Capital Expenditure, Decentralization Fiscal, Per Capita Income.*

*Corresponding author: meita.rachma@gmail.com

Pendahuluan

Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan diberlakukannya UU No. 22 dan UU No.25 tahun 1999. Dari UU tersebut disempurnakan menjadi UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004. Pada prinsipnya desentralisasi bertujuan antara lain: untuk melakukan efisiensi sektor publik dalam produksi dan distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal (*Giannoni, 2002*).

Selain itu Silverman (1990) dalam Laporan World Bank di Uganda (2005) menyatakan bahwa pemerintah lokal lebih responsif terhadap warga negaranya dibanding pemerintah pusat sehingga keputusan yang diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat. Desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat dan mendorong mereka untuk lebih terlibat secara langsung. (*Mills,1994*).

Saat ini isu pokok yang muncul bukan lagi pada bagaimana menciptakan sistem transfer sehingga sumber dana untuk daerah (terutama daerah miskin) berjumlah relatif cukup memadai sehingga daerah satu dengan lainnya tidaklah terlalu timpang. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan daerah terutama daerah-daerah yang tidak kaya untuk bisa menggunakan APBDnya secermat mungkin dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Hirawan,2007*). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah selama ini kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (*Halim, dkk (2004)* dalam *Agustino (2005)*).

Ditetapkannya UU No. 5 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut tentunya berakibat pada beralihnya manajemen desentralisasi fiskal di pemerintahan daerah. Kebijakan pemerintah pusat dengan melaksanakan desentralisasi fiskal di era otonomi daerah

mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan dari sisi fiskal antara satu daerah otonom dengan daerah otonom yang lainnya. Penerapan desentralisasi dilaksanakan melalui alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, atau dari pemerintah daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikenal dengan istilah “dana transfer”. Dana transfer dikelola didasarkan pada regulasi atau peraturan yang berlaku.

Pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya kebijakan yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU ini efektif diberlakukan per Januari tahun 2001. Dalam perkembangannya UU tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 dan UU No. 33 tahun 2004. Nomenklatur pengelolaan keuangan daerah saat ini secara teknis berpedoman pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perbedaan yang cukup signifikan dengan Permendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, perbedaan tersebut salah satunya adalah dalam Permendagri No 29 tahun 2002 pada struktur belanjanya menggunakan istilah belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik yang masing-masing dirinci menjadi kelompok belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan sedangkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006, belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa,

belanja tidak terduga dan belanja langsung yang dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Penelitian Holtz-Eakin *et al* (1994) menemukan keterkaitan erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah & Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Ini diperkuat oleh Prakoso (2004) yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) juga semakin memperkuat kecenderungan ini, dimana kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dalam bentuk transfer.

Penelitian berbeda dilakukan Braga (2004), pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif. Penelitian Ikin Solikin (2007) terdapat hubungan positif yang kuat antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang akan diteliti, apakah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan perkapita. Secara keseluruhan di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah bahwa total alokasi pendapatan asli daerah maupun dana transfer dari pusat dan pemerintah propinsi Jawa Tengah yang dialokasikan ke kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah semakin besar namun jika dibandingkan dengan alokasi belanja modal pada kabupaten/kota tiap tahun tidak selalu bertambah naik. Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti apakah alokasi dana pada tiap-tiap kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah

mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal di masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Rerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Government Expenditure Theory

Berdasarkan teori Kebijakan Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure Theory*) melalui mekanisme ISLM, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurve pendapatan nasional naik keatas atau pendapatan nasional meningkat. Kenaikan pendapatan nasional akan menaikkan tingkat harga umum. Berdasarkan mekanisme IS maka kenaikan harga menyebabkan upah riil menurun. Penurunan upah riil menyebabkan pengangguran berkurang dengan kata lain employment meningkat. Peningkatan tenaga kerja berdasarkan teori produksi akan meningkatkan output nasional. Dengan demikian kenaikan belanja pemerintah diyakini akan meningkatkan output nasional atau pendapatan nasional yang sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita (Langdana, 2009).

Wagner (1883) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar

juga. Pendapat ini mendasarkan Peacock & Wiseman (1967), menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat. Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

Pelaksanaan pembangunan merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lagi untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Anggaran-anggaran tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

Fiscal Theory

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional tergantung pada jenis sumber penerimaan. Pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kemampuan belanja pemerintah yang diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.

Kebijakan fiskal pemerintah menggunakan konsep anggaran belanja seimbang (*balance approach*), dimana adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia.

Dari sisi fiskal, pemerintah harus berpihak pada industri dalam negeri dengan menurunkan bea masuk bahan baku industri sehingga kapasitas produksi terutama orientasi ekspor bisa dipertahankan. Jika seluruh kebijakan dijalankan pemerintah secara bersamaan (moneter, fiskal, dan perdagangan), dunia industri diharapkan tidak dengan mudah mengurangi karyawan. Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga peningkatan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

Desentralisasi

Maddick (1963) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan memperoleh informasi yang lebih baik mengenai keadaan daerah, untuk menyusun program-program daerah secara lebih responsif dan untuk mengantisipasi secara cepat manakala persoalan-persoalan timbul dalam pelaksanaan. Sementara *Hoogerwerf* (1978), desentralisasi adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.

Koswara (1996), desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna yaitu melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagian diserahkan kepada Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pengertian desentralisasi pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada ps 1:7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali untuk urusan-urusan yang meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Desentralisasi Fiskal

Saragih (2003), desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Syahrudin (2006) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai kewenangan (*authority*) dan tanggungjawab (*responsibility*) dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah (APBD) oleh pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal sebagai upaya pemindahan kekuasaan untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya finansial dan fiskal (*Ferdiana, dkk, 2008*).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung

sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari pendapatan asli daerah termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, dan subsidi/bantuan dari pemerintah pusat (Sidik, 2002).

Syahrudin (2006) menyatakan terdapat dua fungsi pemerintah yakni fungsi ekonomi dan fungsi non ekonomi. Fungsi ekonomi menurut Musgrave (1973) dalam Syahrudin (2006) disebut sebagai fungsi anggaran (*fiscal function*) yang terdiri dari fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan pendapatan antar individu dalam masyarakat. Fungsi stabilisasi dalam fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi.

Adapun tujuan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam RAPBN TA. 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*);
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
- 3) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
- 4) Tata kelola, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil;
- 5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Bastian (2001), penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah. Pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota dengan besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN sedangkan untuk proporsi yang dialokasikan untuk propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara propinsi dan kabupaten/ kota.

Penetapan dana alokasi umum menggunakan formulasi pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS Daerah

$$\text{DAU} = \text{Alokasi dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Ket:

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Dana Alokasi Khusus

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan besaran ditetapkan setiap tahun

dalam APBN. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping minimal 10 % dari total alokasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan

Bantuan keuangan merupakan belanja tidak langsung yang dialokasikan oleh pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota maupun pemerintahan desa di wilayahnya yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Sebagai wujud dalam proses mendukung desentralisasi fiskal yang sedang terjadi pemerintah propinsi sesuai amanat Permendagri No. 13 tahun 2006 dapat mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, belanja hibah dan belanja bantuan sosial kepada pihak lain selama urusan wajib maupun urusan pilihan yang dialokasikan oleh pemerintah telah dipenuhi terlebih dahulu.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006 ps. 53). Perhitungan atas perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. (PP No. 71 Tahun 2010; lampiran I.08 PSAP07-5).

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDP) perkapita.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Pendapatan asli daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002). Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Penelitian Ikin Solikin (2007) menemukan hubungan positif yang kuat antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal, hasil ini dikuatkan oleh Daryanto dan Yustikasari (2007) yang menyebutkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Belanja Modal.*

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Beberapa daerah peran dana alokasi umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (Sidik, *et al* 2002). Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar. Abdullah dan Halim (2006) menemukan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah dana alokasi umum. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana

alokasi umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk pendapatan asli daerah (Adi, 2006). Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : *Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.*

Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

Dana alokasi khusus dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di 19 bidang. Husni (2011) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berkontribusi signifikan terhadap belanja modal.

Pengaturan pemanfaatan dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dengan tujuan dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastrukturnya lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari dana alokasi khusus tersebut tersebut tentunya akan berimbas pada peningkatan pengalokasian belanja untuk fisik yang dalam APBD terakomodir dalam jenis belanja barang modal. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 : *Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.*

Hubungan Bantuan Keuangan dari Propinsi dengan Belanja Modal

Guna pemerataan pembangunan di wilayah pemerintahan kota/kabupaten sudah sewajarnya pemerintah propinsi mengalokasikan dana transfer kepada pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk dana transfer atau dana perimbangan yang berasal dari pemerintah daerah diatasnya. Temuan Abdullah dan Halim (2006) menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota yang dimaksudkan untuk memberikan stimulan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan karena fokus dari

alokasi bantuan keuangan tersebut adalah digunakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana baik dibidang infastruktur, pendidikan keagamaan dan masyarakat. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis

Hipotesis 4: *Bantuan Keuangan dari pemerintah propinsi berpengaruh positif pada Alokasi Belanja Modal.*

Hubungan Belanja Modal dengan Pendapatan Perkapita

Bertambahnya infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita. Jika PEMDA menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004).

Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 5 : *Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Perkapita.*

METODA RISET

Polulasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi Jawa Tengah. Dipilihnya Jawa Tengah karena merupakan salah satu propinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang cukup banyak. Selain itu merupakan propinsi yang sering mendapatkan penghargaan terkait dengan capaian yang mendukung program nasional dan pengelolaan keuangan yang baik. Pemilihan sampel menggunakan metoda *purposive sampling method* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008) . Sampel yang dipilih memiliki kriteria yakni tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dari tahun 2008 hingga 2011. Adapun sampel penelitian ini menggunakan data dari 35 pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kotamadya yang keseluruhan berada di wilayah administratif provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2011 sehingga keseluruhan sampel data awal sebanyak 140 pengamatan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara tiap-tiap kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah diuraikan dan dihitung dari alokasi belanja modal yang mencakup belanja modal untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan serta belanja aset lainnya, yang ada pada tiap kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.

Belanja Modal

Belanja modal yang merupakan belanja fisik yang mempunyai kriteria umur manfaat lebih dari 1 (satu) tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing

kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang diperoleh dari unsur pembiayaan dari dana transfer (DAU, DAK, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) dan juga pendapatan asli daerah tersebut. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang diperhitungkan berdasarkan harga perolehan

Untuk mengetahui ratio pertumbuhan belanja modal pada suatu daerah di kabupaten/kota dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Ratio BM} : \frac{\text{Belanja Modal tahun } t}{\text{APBD Tahun } t}$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

$$\text{Ratio PAD} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{APBD Kabupaten/Kota}}$$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang dengan proporsi penentuan dari 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto.

$$\text{Ratio Dana Alokasi Umum} : \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{APBD Kabupaten/Kota}}$$

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang juga dipersyaratkan dalam Undang-Undang dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan besaran ditetapkan setiap tahun dalam APBN

Ratio Dana Alokasi Khusus: $\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{APBD Kabupaten/Kota}}$

Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan mencakup belanja bantuan bidang sarana dan prasarana, bidang pendidikan, FEDEP, rehabilitasi lahan kritis, TMMD, profil daerah.

Ratio pendanaan yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota :

$\frac{\text{Alokasi Bantuan Keuangan}}{\text{APBD Kabupaten/Kota}}$

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut

Ratio Pertumbuhan Pendapatan Perkapita :

$\frac{\text{Pendapatan Perkapita tahun } t - \text{Pendapatan Perkapita Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan perkapita Tahun } (t-1)}$

Teknik Analisis

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi yang menggambarkan hubungan antara variable sebagai berikut:

$$BM = + b_1 PAD + b_2 DAK + b_3 DAU + b_4 BK + e$$

$$PP = + b_1 BM + e$$

Dimana:

- BM = Ratio Belanja Modal
- PAD = Ratio Pendapatan Asli Daerah
- DAU = Ratio Dana Alokasi Umum
- DAK = Ratio Dana Alokasi Khusus
- BK = Ratio Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
- PP = Ratio Pendapatan Perkapita

Analisa Data dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel indenpenden dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan bantuan keuangan kabupaten/kota serta variabel dependennya belanja modal dan pendapatan perkapita dapat dilihat pada tabel 1. (lampiran). Sebesar 60 % lebih rata-rata dana perimbangan yang terbesar adalah DAU. Sementara rata-rata PAD relatif masih rendah, hanya 8,7%, hal ini menunjukkan perlu peningkatan potensi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi. Mengingat wilayah Jawa Tengah memiliki potensi pengembangan industri yang cukup baik, sehingga bisa meningkatkan bantuan keuangan propinsi pada kabupaten/kota.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas terhadap keseluruhan variabel yang digunakan diatas baik variabel independen dan variabel dependen nampak pada tabel 5. (lampiran) terlihat nilai skewness standardized residual sebesar 1,92, karena nilainya kurang $\pm 1,96$ maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Pada gambar 1 (lampiran) terlihat bahwa titik-titik menyebar mendekati dan bahkan berhimpit dengan garis diagonal, hal ini menunjukkan distribusi data adalah normal.

Autokorelasi

Nilai Durbin Watson untuk variabel model pertama pada table 4 (lampiran) diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.854. Posisi nilai DW diantara $1,7617 < 1,854 < 2,2383$, maka dapat disimpulkan persamaan model pertama tidak terdapat problem autokorelasi. Sedangkan nilai Durbin Watson untuk variabel model kedua pada tabel. 7 (lampiran) diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.953. Posisi nilai DW dengan nilai dL p diantara $1,7011 < 1,953 < 2,2989$, maka persamaan model kedua tidak terdapat problem autokorelasi.

Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejtser dimana hasilnya dapat disimpulkan baik dalam model pertama maupun kedua yang dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel. 10 (lampiran) disimpulkan tidak terdapat problem asumsi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi terhadap absolute residual memiliki nilai diatas 0,05.

Multikolinieritas

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel 3. (lampiran) menunjukkan tidak ada satupun dari keempat variabel tersebut memiliki nilai lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem multikolonieritas dalam model tersebut. Hasil ini menunjukkan data yang digunakan penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut

Uji Model (*Goodness of Fit Models*)

Pada model pertama dapat terlihat pada table 2. (lampiran) menunjukkan signifikansi F-test sebesar 0,000, hal ini menunjukkan secara keseluruhan model tersebut adalah fit. Dan pada tabel. 4 (lampiran) nilai koefisien determinasi sebesar 0,343, hal ini menunjukkan secara keseluruhan model pertama hanya mampu menjelaskan 34,3 % varians belanja modal.

Sementara pada model kedua terlihat pada tabel 8. (lampiran) menunjukkan signifikansi T-test sebesar 0,000 , hal ini menunjukkan secara keseluruhan model tersebut adalah fit. Dan pada tabel 7. (lampiran) nilai koefisien determinasi sebesar 0,866, hal ini menunjukkan secara keseluruhan model kedua mampu menjelaskan 86,6 % varians pendapatan per kapita.

Uji Hipotesa dan Pembahasan

Hipotesis 1 menghasilkan nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di wilayah administratif propinsi Jawa Tengah terhadap belanja modal pada tabel 3. (lampiran) sebesar -0,079. Hal ini menunjukkan hipotesis 1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam kenyataannya bahwa alokasi pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di wilayah administratif propinsi Jawa Tengah dari porsi pendapatan APBD.

Propinsi Jawa Tengah kurang dari 40 % dari total pos pendapatan yang ada pada APBD dan PAD yang diperoleh dari retribusi sebagian digunakan kembali untuk membiayai belanja pegawai petugas pemungut retribusi tersebut, bahkan jika dihitung pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 didapat rata-rata jumlah penerimaan dari pendapatan asli daerah hanya 8,7% dari komponen APBD. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya Alokasi Belanja Modal yang dialokasikan di kabupaten/kota tidak ditentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah tersebut. Hal ini terjadi karena alokasi pendapatan asli daerah memiliki kontribusi sangat kecil terhadap pendapatan pada APBD kabupaten/kota

tersebut. Hipotesis tersebut tidak mendukung teori fiskal. Dengan kata lain desentralisasi fiskal memiliki kontribusi yang masih rendah. Temuan ini tidak sejalan dengan Ikin Solikin (2007) dan Daryanto & Yustikasari (2007).

Hipotesis 2 memiliki nilai probabilitas Dana Alokasi Umum di kabupaten/kota di wilayah administratif propinsi Jawa Tengah terhadap belanja modal pada tabel 3. (lampiran) sebesar -0,000. Hal ini menunjukkan hipotesis 2 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap DAU sedemikian besar, karena 60% lebih dari pendapatan hampir semua kabupaten/kota di Jawa Tengah bersumber dari Dana Alokasi Umum, namun peruntukkannya dipergunakan untuk pemenuhan belanja pegawai yang menyerap lebih dari 60 persen dari alokasi belanja pegawai. Tendensi arah negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal (14,03%) lebih kecil dari pertumbuhan DAU (60,7%), hal ini disebabkan karena selama periode amatan terjadi kenaikan harga (laju inflasi cukup tinggi) sehingga biaya operasional pemerintah kota/kabupaten wilayah administrative Jateng meningkat. Temuan ini tidak sejalan dengan temuan Sidik *et.al* (2002), Abdullah & Halim (2006), dan Holtz-Eakin *et al* (1994).

Hipotesis 3 menghasilkan nilai probabilitas dana alokasi khusus di kabupaten/kota di wilayah administratif propinsi Jawa Tengah terhadap belanja modal pada tabel 3. (lampiran) sebesar -0,958. Hal ini menunjukkan hipotesis 3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus periode 2008 - 2011 tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang secara keseluruhan diperuntukkan untuk bidang-bidang tertentu terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana. Namun rata-rata alokasi dana ini selama periode amatan 2008-2011 sebesar 6,5% atau kata lain pertumbuhan anggaran untuk pembiayaan sarana prasarana masih

jauh dari harapan dibanding dana alokasi umum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Husni (2011). Namun tidak sejalan dengan Holtz-Eakin *et al* (1994) menemukan keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

Hipotesis 4 memiliki nilai probabilitas bantuan keuangan di kabupaten/kota di wilayah administratif provinsi Jawa Tengah terhadap alokasi belanja modal pada tabel 3. (lampiran) sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan hipotesis 4 terbukti diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja bantuan keuangan dari tahun 2008 -2011 berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Alokasi bantuan keuangan dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota menjadi pendapatan bagi APBD kabupaten/kota tersebut, alokasi bantuan keuangan tersebut diperuntukan untuk belanja modal yang dialokasikan pada beberapa bidang yaitu sarana prasarana, pendidikan, kemasyarakatan yang tujuannya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota, namun alokasi tiap kabupaten/kota berbeda dan alokasi bantuan tersebut jumlahnya *fluktuatif* tergantung kemampuan keuangan propinsi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdullah& Halim (2006).

Hipotesis 5 memiliki nilai probabilitas alokasi belanja modal terhadap perubahan pendapatan per kapita pada tabel 9. (lampiran) sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan hipotesis 5 terbukti diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan belanja modal tahun 2008-2011 berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita kabupaten/kota di wilayah administrasi propinsi Jawa Tengah. Pendapatan perkapita menjadi dasar karena lebih akurat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Pendapatan perkapita dihitung berdasarkan jumlah PDRB dibanding dengan jumlah penduduk, Jumlah PDRB merupakan jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat di suatu wilayah yang bisa berasal dari sektor perdagangan, jasa, perindustrian maupun sumber pendapatan yang lain. Penentu pendapatan perkapita juga

diperoleh dengan menghitung hasil dari masyarakat, walaupun masyarakat tersebut tidak berdomisili di wilayah tersebut. Pengadaan belanja modal oleh pemerintah melalui pengalokasian belanja modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dan memberikan akses guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kuncoro (2004), Lin dan Liu (2000) , dan Adi (2006). Hasil hipotesis ini mendukung *Government Expenditure Theory*. Mengingat pertumbuhan belanja secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, maka peningkatan belanja harus selalu diusahakan agar peningkatan pendapatan masyarakat dapat terjaga kelangsungannya. Hal ini sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat. Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dihasilkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat merupakan sumber dana yang sangat penting bagi sumber pendanaan di kabupaten/kota di wilayah administratif

- Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat bahwa terdapat kabupaten/kota yang sumber pendapatan dari Dana Perimbangan melebihi 40% dari seluruh pendapatan yang dipergunakan untuk membiayai belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya.
2. Komponen dana perimbangan yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tercermin pada variable Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota di dominasi oleh Dana Alokasi Umum yang mempunyai alokasi terbesar dibandingkan dengan dana transfer yang lain.
 3. Hasil analisa diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi kepada kabupaten/kota yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota sedangkan alokasi DAU dan PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal.
 4. Jumlah Belanja Modal yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kabupaten/kota di wilayah administrasi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah disimpulkan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita yang ada pada masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota di wilayah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain:

1. Objek penelitian hanya pada satu wilayah administrasi propinsi saja sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk wilayah propinsi atau daerah yang lain. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas objek dan lingkup penelitiannya dengan komparasi wilayah propinsi lain.

2. Penelitian ini tidak mengelompokkan objek Belanja Modal yang dialokasikan yang bermanfaat atau dapat digunakan langsung oleh masyarakat atau belanja modal yang dipergunakan untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah di daerah tersebut.
3. Rentang waktu penelitian hanya 4 tahun anggaran, sehingga hasil penelitian belum komprehensif dikarenakan adanya beberapa perubahan nomenklatur pengkodean jenis belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel dengan rentang waktu yang lebih panjang.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini sejalan dengan konsep teori bahwa alokasi belanja modal pada suatu daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercermin pada pendapatan perkapita di wilayah tersebut. Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan perlu meningkatkan potensi pendapatan asli daerahnya yang ada untuk semakin meningkatkan sumber pendanaan dari pos tersebut. Selain itu pemerintah daerah dihimbau perlu menata ulang alokasi kebutuhan pegawainya sehingga dapat menekan alokasi belanjanya sehingga dapat dipergunakan untuk menambah alokasi belanja modal.

DAFTAR REFERENSI

- Afridian Wirahadi Ahmad, Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcome Bidang Kesehatan: Studi Empiris di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. Simposium Nasional Akuntansi XIII. 2010
- Aloysius Gunadi Brata, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Abdul Halim, Abdullah Syukriy, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159.
- Abdullah Syukriy, Abdul Halim, 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2, November.
- Badan Pusat Statistik, 2011, *Jawa Tengah dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Bastian, Indra. 2008. Akuntansi Kesehatan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bird, R.M. 1998. "Analysis of Earmarked Taxes." *Tax Notes International (June 23)*, pp. 2095-2116.
- Daryanto dan Yulia Yustikasari. 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal, *Simposium nasional Akuntansi X, Makassar*.
- David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007, Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita, *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Ekowidjanto. 1996. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II menurut Undang-Undang No 5 tahun 1974*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erdal Karago and Kerim Ozdemir. Government Expenditures and Private Investment: Evidence from Turkey. *The Middle East Business and Economic Review*, Volume 18, No. 2, December 2006, Page 33.
- Sajkumar Tulsidharan. Government Expenditure and Economic Growth in India (1960-2000). *Finance India* Vol. XX.No.1 March.2006. Page 169.
- Farrokh K Langdana. 2009. *Macro Economy policy*. Springer Science Business Media USA. Second Edition
- Gaspersz, Vincent dan Esthon Foenay. 2003. Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat Dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th. II - No. 8 - November 2003.
- Hadi, 2006. *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sampel Lingkungan*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujid. 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Harry Azzar Azis, Syahrudin, 2009, *Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009*.
- Hasrina Husni, 2011, Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Dengan Belanja Modal Sebagai variabel Intervening Studi empiris Di Kabupaten/kota Provinsi Aceh, *Initial Repository*, Universitas Sumatera Utara.

- Herlina Ismerdekaningsih, SE & Endah Sri Rahayu, SE. 2002. Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto Di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000). *ITB Central Library*.
- Hogerwerf. 1978 Alphen Aan den Rijn: Samson, 1978, *Public Administration*, Netherland.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1994. Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economics* 35: 159-174.
- Ikin Solikin. 2007. Hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal di Jawa Barat.
- Imam Ghozali. 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iqbal Hasan, 2006. *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Juli Panglima Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Kesit Bambang Prakosa. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8 No. 2*, 101-118.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.
- Machfud Sidik, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, Bambang Brodjonegoro, 2002 Dana Alokasi Umum, Konsep, hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Maddick, Henry, 1963. *Democracy, Decentralization and Development*. Bombay: Asia Publishing House.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mills, A. 1994. Decentralization and Accountability in The Health Sector From an International Perspective: What Are The Choices?. *Public Administration and Development*, Vol. 14.
- Moleong, 2006, *Metode penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung Remaja Rosdan Karya, Bandung.
- Muana Nanga. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT : Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik. *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Mudrajat Kuncoro, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Peacock, A. T. & Wiseman, J. 1967. *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*, New Edition, London: George Allen & Unwin Ltd.
- Priyo Hari Adi, 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Studi Pembangunan Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Priyo Hari Adi, 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota seJawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang*.
- Singgih Santoso, 2002, *Statistic Multivariate*, PT Elex Media Komoutindo, Jakarta.
- Soejito Irawan, 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Sri Mulyani Erlina, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, USU Press, Medan. Singgih 2002.
- Supatman, 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Media Penelusuran Koleksi Pustaka Ilmiah*. Universitas Padjajaran Bandung.
- Syahruddin. 2006. Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten.
- Wagner, A., 1883. "Three Extracts on Public Finance", translated and reprinted in R.A. Musgrave and A.T. Peacock (eds), *Classics in the Theory of Public Finance*, London: Macmillan, 1958.
- , 2004, *Undang-Undang nomor 32* Republik Indonesia: Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta.
- , 2004, *Undang-Undang nomor 33* Republik Indonesia: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Depdagri, Jakarta.
- , 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24* Republik Indonesia: Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13* Republik Indonesia, Depdagri, Jakarta.
- , 2011 *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21* Republik Indonesia, Depdagri, Jakarta.

Lampiran

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAK	140	.00912	.09955	.0655307	.02009860
DAU	140	.37926	.92554	.6067501	.07453502
PAD	140	.04755	.22195	.0870465	.02978722
BK	140	.00806	.09456	.0236750	.01285234
BM	140	.03782	.29710	.1402763	.05240142
PP	140	.03786	.29802	.1385218	.05282127
Valid N (listwise)	140				

Tabel 2. ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.063	4	.016	6.707	.000 ^a
	Residual	.318	135	.002		
	Total	.382	139			

a. Predictors: (Constant), BK, PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BM

Tabel 3. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.329	.048		6.922	.000
	DAK	-.012	.226	-.005	-.053	.958
	DAU	-.307	.064	-.437	-4.790	.000
	PAD	-.293	.165	-.166	-1.769	.079
	BK	1.003	.340	.246	2.949	.004

a. Dependent Variable: BM

Tabel 4. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.607 ^a	.368	.343	.04856531	1.854

a. Predictors: (Constant), BK, PAD, DAK, DAU

Tabel 5. Statistics

Unstandardized Residual

N	Valid	140
	Missing	0
Skewness		.394
Std. Error of Skewness		.205

Tabel 6. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.079	.028		2.807	.006
	DAK	.166	.134	.115	1.235	.219
	DAU	-.087	.138	-.123	-1.289	.236
	PAD	-.016	.098	-.016	-.160	.873
	BK	.088	.202	.039	.434	.665

a. Dependent Variable: residual

Tabel 7. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.931 ^a	.867	.866	.01930408	1.953

a. Predictors: (Constant), BM

b. Dependent Variable: PP

Tabel 8. ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.336	1	.336	902.721	.000 ^a
	Residual	.051	138	.000		
	Total	.388	139			

a. Predictors: (Constant), BM

b. Dependent Variable: PP

Tabel 9. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.007	.005		1.460	.146
	BM	.939	.031	.931	30.045	.000

a. Dependent Variable: PP

Tabel 10. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.014	.004		3.788	.000
BM	-.020	.025	-.068	-.800	.425

a. Dependent Variable: absres

Gambar 1.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



